


PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

LAPORAN KEUANGAN

Semester II

Periode 2021

Kode Satker :402017



Jl. HM. Asyik Aqil KM. 16 Sukajadi Talang Kelapa

Banyuasin - Sumatera Selatan

Telp/Fax. (0711) 5723669



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. HM. Asyik Aqil KM. 16 Sukajadi Talang Kelapa

Banyuasin - Sumatera Selatan

Telp/Fax. (0711) 5723669

e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Balai, 01 Maret 2022

**Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,**

ENDANG EFENDI, S.E., M.M.
NIP.198409132009041002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran.....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab.....	v
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	5
II. Neraca.....	7
III. Laporan Operasional.....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	13
A. Penjelasan Umum.....	13
A.1. Dasar Hukum.....	13
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.....	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.4. Basis Akuntansi.....	15
A.5. Dasar Pengukuran.....	16
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	24
B.2. Belanja.....	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	26
C.1. Aset Lancar.....	26
C.2. Aset Tetap.....	26
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	28
C.6. Ekuitas.....	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	28
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	28
D.2. Beban Pegawai.....	28
D.3. Beban Persediaan.....	29

D.4. Beban Barang dan Jasa.....	29
D.5. Beban Pemeliharaan.....	29
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	29
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	29
D.8. Beban Bantuan Sosial.....	30
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	30
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	30
D.11. Beban Lain-lain.....	30
D.12. Kegiatan Non Operasional.....	31
D.13. Pos Luar Biasa.....	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	31
E.1. Ekuitas Awal.....	31
E.2. Surplus (defisit) LO.....	31
E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset.....	31
E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan.....	32
E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	32
E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	32
E.3. 5 Koreksi Lain-lain.....	32
E.3. 6 Ekuitas Akhir.....	32
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	32
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	32
F.2. Pengungkapan Lain-lain.....	33

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020	2
Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2021	24
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021	24
Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 TA 2021	33

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Pangkalan Balai - Sumatera Selatan 31414
Telp/fax : (0711)-5723669 e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester II Tahun 2021 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 01 Maret 2022

**Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,**


ENDANG EFENDI, S.E., M.M.
NIP.198409132009041002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester II Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, yang terdapat dalam periode tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan anggaran Rp183.940.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) terealisasi untuk semester II sebesar Rp180.474.120,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset Semester II Tahun 2021 per 31 Desember 2021 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp0, kewajiban sebesar Rp0, dan Ekuitas sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2021	2020	Rp	%
Aset Lancar				
Persediaan	0	31.570.605	(31.570.605)	(100,00)
Jumlah Aset Lancar	0	31.570.605	(31.570.605)	(100,00)
Jumlah Aset	0	31.570.605	(31.570.605)	(100,00)
Ekuitas				
Jumlah Ekuitas	0	31.570.605	(31.570.605)	(100,00)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	0	31.570.605	(31.570.605)	(100,00)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan Semester II Tahun 2021 untuk periode 2021, pendapatan Operasional sebesar Rp35.698.500,- (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Beban Operasional Rp224.406.097,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), Surplus / (Defisit)-LO sebesar Rp(188.707.597),- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 31 Desember 2021 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp31.570.605- (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima rupiah), Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(188.707.597),- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan Ekuitas akhir sebesar Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	17.667.000	35.698.500	18.031.500	202.06
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.667.000	35.698.500	18.031.500	202.06
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	17.667.000	35.698.500	18.031.500	202.06
B	BELANJA NEGARA				
B.I.1	Rupiah Murni	183.940.000	180.474.120	(3.465.880)	98.12
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00
B.I.1.b	Belanja Barang	183.940.000	180.474.120	(3.465.880)	98.12
B.I.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	183.940.000	180.474.120	(3.465.880)	98.12
C	PEMBIAYAAN				
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
Persediaan	0
JUMLAH ASET LANCAR	0
JUMLAH ASET	0
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0
EKUITAS	
Ekuitas	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Perjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	35,698,500	16,028,000	19,670,500	122.72
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	35,698,500	16,028,000	19,670,500	122.72
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	35,698,500	16,028,000	19,670,500	122.73
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	107,945,377	41,990,120	65,955,257	157.07
Beban Barang dan Jasa	70,680,720	70,635,750	44,970	0.06
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	45,780,000	46,883,000	(1,103,000)	(2.35)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	224,406,097	159,508,870	64,897,227	40.68
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(188,707,597)	(143,480,870)	(45,226,727)	(31.52)

URAIAN 1	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021 2	2020 3	Jumlah 4	% 5
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	8,997,210	(8,997,210)	(100.00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,001,140	(1,001,140)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	7,996,070	(7,996,070)	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	7,996,070	(7,996,070)	(100.00)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(188,707,597)	(135,484,800)	(53,222,797)	(39.28)

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	31,570,605	0	31,570,605	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(188,707,597)	(135,484,800)	(53,222,797)	39.28
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	157,136,992	167,055,405	(9,918,413)	(5.93)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(31,570,605)	31,570,605	(63,141,210)	(200.00)
EKUITAS AKHIR	0	31,570,605	(31,570,605)	(100.00)

V. *CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Tahun 2021 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk mewujudkan tujuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen dengan visi :

1. *Menjaga Kemandirian*
2. *Pelayanan Hukum yang berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparansi*
4. *Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Transparansi*

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memberikan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.
- Menciptakan kredibilitas profesional dan transparansi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel

masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran**B.1. Pendapatan Negara dan Hibah**

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp35.698.500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.698.500,- (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau mencapai 202.06 persen. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.667.000	35.698.500	202.06
Total Pendapatan		17.667.000	35.698.500	202.06

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara :
Rp180.474.120*

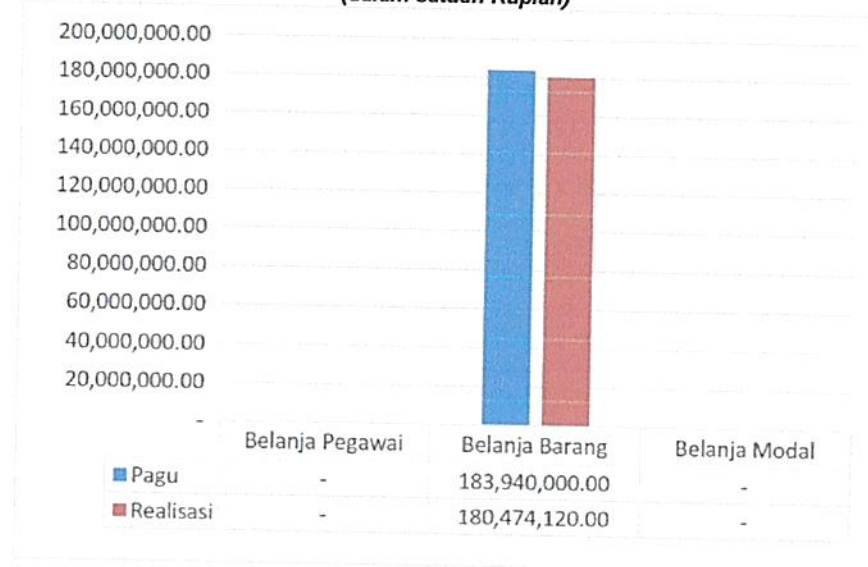
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp180.474.120,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) dari anggaran senilai Rp183.940.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	183.940.000	180.474.120	98.12
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	183.940.000	180.474.120	98.12

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Desember 2021

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 31 Desember TA 2021 Rp0, dari anggaran awal sebesar Rp0.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp180.474.120

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp180.474.120,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) dari anggaran senilai Rp183.940.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal : Rp0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 31 Desember TA 2021 adalah Rp0, dari anggaran Rp0.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp0

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0, yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja
Dibayar di
Muka: Rp0

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

Persediaan:
Rp0

Persediaan periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp0

Nilai Aset Tetap periode 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin periode 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp0 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan periode 30 Juni 2021 sebesar Rp.0,-

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Nilai Kewajiban Jangka Pendek periode 31 Desember 2021 sebesar Rp0.
Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.
Rp0

C.6. Ekuitas

Ekuitas: Ekuitas periode 31 Desember 2021 sebesar sebesar Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Rp0

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp35.698.500,- (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Rp20.858.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
Rp35.698.500

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 0 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp107.945.377 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp107.945.377,- (seratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Rp41.990.120,- (empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh rupiah). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp70.680.720 Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp70.680.720,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Rp70.635.750,- (tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp0 Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp45.780.000 Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp45.780.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp46.883.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp0 Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp0 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp0 Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp0 Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban kegiatan non oprasional untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 31.570.605,- (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima rupiah) dan Rp0.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(188.707.597),- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan Rp(135.484.800),- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp31.570.605,- (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima rupiah).

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrua dalam laporan keuangan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah:

1. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000497305 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
2. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000496309 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM
3. Bank BRI (Persero) Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000489302 a.n. RPL 160 PN P Balai Utk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi I tertanggal 11 Februari 2021;
2. Revisi II tertanggal 04 Juni 2021;
3. Revisi III tertanggal 01 Oktober 2021;
4. Revisi IV tertanggal 15 Oktober 2021.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dapat dijabarkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

-Nihi

LAPORAN PENDUKUNG

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
PERIODE TA. 2021 *UNAUDITED*

Kode BA dan Nama BA : (005) Mahkamah Agung
 Kode Es1 dan Nama Es1: (03) Dirjen Badilum
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (1109) Banyuasin
 Kode Satker dan Nama Satker: (402017) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	v		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual	v		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	v		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	v		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	v		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		v	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/(Defisit) - LO</i> " di LPE	v		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	v		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu <i>Daftar >> Akun Non Ref</i>)		v	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu " <i>Daftar >> Saldo Tidak Normal</i> "), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		v	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU <i>Jayanan Kesehatan di Kemenristek Dikti</i> .		v	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (<i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN</i>)		v	Tidak
Akun Dibayar dimuka (<i>prepaid</i>) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)		v	Tidak

2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		v	Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (<i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021</i>)	v		Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		v	Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211?		v	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		v	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		v	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		v	Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		v	Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya		v	Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah		v	Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>			
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)			
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx		v	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		v	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		v	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		v	Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL		v	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		v	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		v	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		v	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		v	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		v	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		v	Tidak
TELAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		v	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		v	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		v	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		v	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		v	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		v	Ya

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		v	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		v	Tidak
3. Adakah beban bunga		v	Tidak
4. Adakah beban subsidi		v	Tidak
5. Adakah beban hibah		v	Tidak
6. Adakah beban transfer		v	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		v	Tidak
Pengecekan saldo Normal			
	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (<i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i>)		v	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang		v	Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015			
	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) = Beban Penyisihan Piutang LO	v		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		v	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi			
	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?		v	Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		v	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		v	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahra dan Aplikasi Silabi ?	v		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		v	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		v	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		v	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		v	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:		v	Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)		v	Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		v	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		v	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		v	Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)		v	Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		v	Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		v	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		v	Ya
7. Adakah beban bansos?		v	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		v	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?		v	Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		v	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?		v	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		v	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?		v	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		v	Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		v	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?		v	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		v	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")		v	
MENU DAFTAR BMN			
	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		v
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		v
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		v	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		v	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		v	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		v	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	v		
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	v		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		v	Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	v		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?		v	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	v		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)			
	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	v		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	v		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?		v	Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	v		Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional		v	Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang		v	Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	v		Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA			
	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional			
	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

(ADE KURNIAWAN, A.MD)
NIP. 19890419 202012 1 003

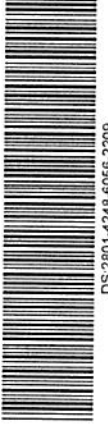
Pangkalan Balat, 01 Maret 2022
Penelaah,

(ENDANG EFENDI, S.E., M.M.)
NIP. 19840913 200904 1 002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.402017/2021



DS 2801-4248-6056-2208

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
4. Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Sebesar : Rp. 183.940.000 (SERATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni
2. PNBP

PNBP TA Berjalan

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - Pinjaman Luar Negeri
 - Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E K A Y U

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jumlah Uang
Rp. 183.940.000
Rp. 183.940.000

Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0

183.940.000
0
0
0
0
0
0

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

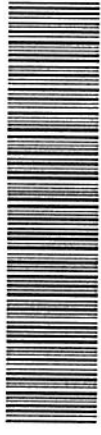
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
- Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung
- Hibah Luar Negeri Langsung
- Hibah Dalam Negeri Langsung
6. SBSN PBS

(160) Rp. 183.940.000

JAKARTA, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-005.03.2.402017/2021
I.A. INFORMASI KINERJA**



DS2801-4248-6056-2209

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Diljen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Saiter : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

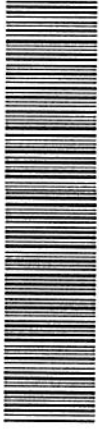
Halaman : I.A. 1

Program	: 005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	183.940.000
Kegiatan	: 1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	183.940.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum	
	: 2. 02	Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan	
	: 3. 03	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang gedung pengadilan	
	: 4. 04	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	
	: 5. 05	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	
	: 6. 06	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan restorative di Mahkamah Agung	
Klasifikasi Rincian Output 1	: 1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	550,00 Perkara
Rincian Output	: 01	BCA.073 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Palembang	550,00 Perkara
Klasifikasi Rincian Output 2	: 1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	40,00 Orang
Rincian Output	: 01	QBA.032 Pos Bantuan Hukum (PN)	40,00 Orang

JAKARTA, 23 November 2020
Direktur Jenderal Badilum

ttt.
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-005.03.2.402017/2021**



DS:2301-4248-6056-2209

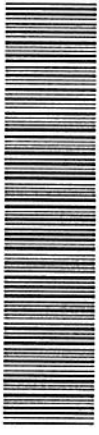
I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Dijin Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

No.	Kode	Uraian	Rp.	Ket :	Pagu	Ekuivalen Rupiah
1.		Anggaran Tahun 2021	183.940.000	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing		0
		1. Rupiah Murni	183.940.000	(2) RPLN		0
		2. PNB	0	(1) Valuta Asing		0
		3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	0	(2) RHLN		0
		4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	0			0
		5. Hibah Langsung	0			0
		6. SBSN PBS	0			0
2.		Rincian Pinjaman / Hibah :				

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	No. NPP/H per Tahun No. Register	1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah	Dana	1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-005.03.2.402017/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2801-4248-6056-2209

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II, 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA							LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	-	183,940	-	-	-	183,940	-	-	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	183,940	-	-	-	183,940	-	-	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	183,940	-	-	-	183,940	-	-	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	159,940	-	-	-	159,940	11.09	-	
01 RM		-	159,940	-	-	-	159,940	160	-	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	24,000	-	-	-	24,000	11.09	-	
01 RM		-	24,000	-	-	-	24,000	160	-	
	JUMLAH	-	183,940	-	-	-	183,940	-	-	

JAKARTA, 23 November 2020
Direktur Jenderal Badilium

ltd.
Dr. H. Prim Hayadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325198031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : DIPA-005.03.2.402017/2021

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2801-4248-6056-2209

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Dijen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

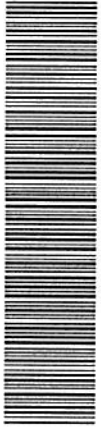
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH			
			JANUARI 4	FEBRUARI 5	MARET 6	APRIL 7	MEI 8	JUNI 9	JULI 10	AGUSTUS 11	SEPTEMBER 12	OKTOBER 13	NOVEMBER 14	DESEMBER 15				
1	402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI																
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	6.000	11.596	4.820	4.910	9.023	4.683	5.435	7.586	80.252	26.680	22.956	183.940			
		BELANJA BARANG	0	6.000	11.596	4.820	4.910	9.023	4.683	5.435	7.586	80.252	26.680	22.956	183.940			
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	0	6.000	11.596	4.820	4.910	9.023	4.683	5.435	7.586	80.252	26.680	22.956	183.940			
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	6.000	11.596	4.820	4.910	9.023	4.683	5.435	7.586	80.252	26.680	22.956	183.940			
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.486	17.667			
		- PNB (425232)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- PNB (425233)	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	828	9.870			
		- PNB (425239)	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	7.785			

JAKARTA, 23 November 2020
Direktur Jenderal Badilium

ltd.
Dr. H. Prim Hayadi, S.H., M.H.
NIP. 196303251988031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-005.03.2.402017/2021
IV A. B L O K I R



DS:2801-4248-6056-2209

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 23 November 2020
Direktur Jenderal Badilum

ttid.
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA-005.03.2.402017/2021
IV B. C A T A N**



DS:2801-1218-6056-2209

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Dijen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 23 November 2020
Direktur Jenderal Badilum

ltd.
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 196303251988031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 183,940,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			183,940,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			183,940,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	550.0 Perkara		159,940,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.BCA.073	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Palembang	550.0 Perkara		159,940,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			69,770,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			69,770,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			5,750,000	RM
	- Penggandaan dan penjilitan berkas	575.0 PKR	10,000	5,750,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			64,020,000	RM
	- Alat tulis kantor	660.0 PKR	97,000	64,020,000	
052	Penetapan Hari Sidang			21,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			21,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			21,000,000	RM
	- Pengiriman penetapan hari sidang	300.0 OK	70,000	21,000,000	
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan			24,390,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,390,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			24,390,000	RM
	- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	13.0 OK	30,000	390,000	
	- Konsumsi Pengamanan Persidangan	800.0 OK	30,000	24,000,000	
054	Minutas/Upaya Hukum			16,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			16,500,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			16,500,000	RM
	- Penggandaan dan penjilitan berkas perkara	550.0 PKR	30,000	16,500,000	
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa			14,200,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,200,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			200,000	RM
	- Pengiriman petikan/salinan putusan [10 OK]	10.0 OK	20,000	200,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			14,000,000	RM
	- Pengiriman petikan/salinan putusan [200 OK]	200.0 OK	70,000	14,000,000	
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			10,700,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			10,700,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			200,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	10.0 OK	20,000	200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 183,940,000

Halaman : 2

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			10,500,000	RM
057	- Pengiriman penahanan dan perpanjangan penahanan Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	150.0 OK	70,000	10,500,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,500,000	U
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,500,000	
	- Pengiriman Salinan Putusan	5.0 PKR	20,000	100,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			100,000	
	- Pemberitahuan putusan banding kepada jaksa/terdakwa	10.0 OK	70,000	700,000	
	- Pemberitahuan proses banding kepada jaksa/terdakwa	10.0 OK	70,000	700,000	
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama			1,880,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,880,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			480,000	RM
	- Pengiriman berkas kasasi dan Peninjauan kembali	6.0 PKR	80,000	480,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			1,400,000	RM
	- Pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada jaksa/terdakwa/penasehat hukum	10.0 OK	70,000	700,000	
	- Pemberitahuan proses kasasi dan peninjauan kembali kepada jaksa/terdakwa/penasehat hukum	10.0 OK	70,000	700,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	40.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	40.0 Orang		24,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			24,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			24,000,000	RM
	- Belanja Jasa konsultan [1 ORG x 2 JAM x 10 Hari x 12 BLN	240.0 OJ	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 12 Januari 2022



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03
 WILAYAH/PROVINSI : 1100
 SATUAN KERJA : 402017
 JENIS KEWENANGAN : KD

MAHKAMAH AGUNG
 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 SUMATERA SELATAN
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 KANTOR DAERAH

Kode Laps : LRAST
 Tanggal : 03 March 2022
 Halaman : 1
 Prog.id : la_psskt

No	URAIAN	2021					2020				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.		
1	2										
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH										
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	17,667,000	35,698,500	18,031,500	202.06	0	20,858,000	20,858,000	0.00		
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	17,667,000	35,698,500	18,031,500	202.06	0	20,858,000	20,858,000	0.00		
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	17,667,000	35,698,500	18,031,500	202.06	0	20,858,000	20,858,000	0.00		
B	BELANJA NEGARA										
B.1.1	Rupiah Murni	183,940,000	180,474,120	(3,465,880)	98.12	183,940,000	181,449,750	(2,490,250)	98.65		
B.1.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.b	Belanja Barang	183,940,000	180,474,120	(3,465,880)	98.12	183,940,000	181,449,750	(2,490,250)	98.65		
B.1.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	JUMLAH BELANJA	183,940,000	180,474,120	(3,465,880)	98.12	183,940,000	181,449,750	(2,490,250)	98.65		
C	PEMBIAYAAN										
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LRAS1
 Tanggal : 08 March 2022
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_pasrkt

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Pangkalan Balai, 31 Desember 2021

Sekretaris



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG

SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 005.03.11.402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2021						NILAI BUKU
			KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...	TIDAK ADA DATA			0	0	0	0	0	0
	TOTAL			0	0	0	0	0	0

PANGKALAN BALAI, 31 Desember 2021

Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	35,698,500	16,028,000	19,670,500	122.72
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	35,698,500	16,028,000	19,670,500	122.72
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	35,698,500	16,028,000	19,670,500	122.73
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	107,945,377	41,990,120	65,955,257	157.07
Beban Barang dan Jasa	70,680,720	70,635,750	44,970	0.06
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	45,780,000	46,883,000	(1,103,000)	(2.35)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	224,406,097	159,508,870	64,897,227	40.68
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN	(188,707,597)	(143,480,870)	(45,226,727)	(31.52)

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
OPERASIONAL				
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	8,997,210	(8,997,210)	(100.00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,001,140	(1,001,140)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	7,996,070	(7,996,070)	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	7,996,070	(7,996,070)	(100.00)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(188,707,597)	(135,484,800)	(53,222,797)	(39.28)

Pangkalan Balai, 31 Desember 2021
 Sekretaris

 Endang Efendi, S.E., M.M.
 NIP. 198409132009041002

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	31,570,605	0	31,570,605	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(188,707,597)	(135,484,800)	(53,222,797)	39.28
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	157,136,992	167,055,405	(9,918,413)	(5.93)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(31,570,605)	31,570,605	(63,141,210)	(200.00)
EKUITAS AKHIR	0	31,570,605	(31,570,605)	(100.00)

Pangkalan Balai, 31 Desember 2021

Sekretaris

Endang Erendi S.E., M.M.

NIP. 198409132009041002



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIE1T
 Tanggal : 08/03/22
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	0	31,570,605	(31,570,605)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	31,570,605	(31,570,605)	(100.00)
JUMLAH ASET	0	31,570,605	(31,570,605)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	31,570,605	(31,570,605)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	31,570,605	(31,570,605)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	31,570,605	(31,570,605)	(100.00)

Pangkalan Balai, 31 Desember 2021
 Sekretaris

 Endang Efendi, S.E., M.M.
 NIP. 198409132009041002

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 08-03-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	3,465,880	
0	219711	Utang Kepada KUN	18,031,500	
2	425232	Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Yang Dialokasikan	9,000	
2	425233	Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara Yang Dialokasikan	9,870,000	
2	425239	Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Yang Dialokasikan	7,788,000	
2	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		980,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		46,640,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		64,020,000
2	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan		24,000,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		48,300,000
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara		3,690,000
3	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		32,008,500
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	240,720	
3	521211	Belanja Bahan	46,440,000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	64,013,400	
3	522131	Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,780,000	
		J U M L A H	219,638,500	219,638,500

DAFTAR TRANSAKSI TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK
 PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

TGL DOKUMEN	KODE TRANSAKSI	KODE AKUN	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	SATKER INTRACO
1	2		3	4	5	6
28-02-21	M03	117111	Barang Konsumsi	4,829,000	0	005030100097450000KP
28-02-21	M03	313221	Transfer Masuk	0	4,829,000	005030100097450000KP
31-03-21	M03	117111	Barang Konsumsi	7,532,372	0	005031100099225000KD
31-03-21	M03	313221	Transfer Masuk	0	7,532,372	005031100099225000KD

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN
UNTUK TAHUN 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 JENIS SATKER : XX
 Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPE.T01b
 TANGGAL : 08/03/22
 HAL : 1
 PROG. ID : lue_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7
		----- Tidak Ada Data Yang Dicetak -----				

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH

KD LAPORAN : LRPS.T01
 TANGGAL : 08/03/22
 HAL : 1
 PROG. ID : lu_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN					% REAL. PEND
			TAHUN INI 4	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI 5	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI 6	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI 7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	TRANSAKSI KAS							
I	Penerimaan Dalam Negeri							
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9,000	0	0	0	0	0.00	
425	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	9,870,000	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000	37.38	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	7,788,000	32,008,500	32,008,500	0	32,008,500	410.99	
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi							
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	17,667,000	35,698,500	35,698,500	0	35,698,500	202.06	
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	17,667,000	35,698,500	35,698,500	0	35,698,500	202.06	
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	17,667,000	35,698,500	35,698,500	0	35,698,500	202.06	
	Jumlah Penerimaan 42523							
	Jumlah Penerimaan 4252							
	Jumlah Penerimaan 425							
	Jumlah Penerimaan 42							
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri							
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH							
	JUMLAH PENDAPATAN							
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2021
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 08 March 2022
 Halaman : 1
 Prog.id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	TRANSAKSI KAS									
0	RUPIAH MURNI									
03	RM									
04	KETERTIBAN DAN KEAMANAN									
BF	PERADILAN									
1049	Program Penegekakan dan Pelayanan Hukum									
BCA	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum									
52	Perkara Hukum Perseorangan									
5211	BELANJA BARANG									
52111	Belanja Barang Operasional									
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.200.000	980.000	240.720	240.720	0	240.720	24.56	739.280	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3.200.000	980.000	240.720	240.720	0	240.720	24.56	739.280	
5212	Belanja Barang Non Operasional									
521211	Belanja Bahan	4.000.000	46.640.000	46.440.000	46.440.000	0	46.440.000	99.57	200.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4.000.000	46.640.000	46.440.000	46.440.000	0	46.440.000	99.57	200.000	
5218	Belanja Barang Persediaan									
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9.000.000	64.020.000	64.013.400	64.013.400	0	64.013.400	99.99	6.600	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	9.000.000	64.020.000	64.013.400	64.013.400	0	64.013.400	99.99	6.600	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri									
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.704.000	48.300.000	45.760.000	45.760.000	0	45.760.000	94.78	2.520.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	33.704.000	48.300.000	45.760.000	45.760.000	0	45.760.000	94.78	2.520.000	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	49.904.000	159.940.000	156.474.120	156.474.120	0	156.474.120	97.83	3.465.880	
	JUMLAH BELANJA KRO 1049 BCA	49.904.000	159.940.000	156.474.120	156.474.120	0	156.474.120	97.83	3.465.880	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2021
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03
WILAYAH/PROPINSI : 1100
SATUAN KERJA : 402017
JENIS SATUAN KERJA : KD

DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
SUMATERA SELATAN
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 08 March 2022
Halaman : 2
Prog.Id : lu_lrbstkt

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan									
52	BELANJA BARANG									
5221	Belanja Jasa									
522131	Belanja Jasa Konsultansi									
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	100.00	0	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	100.00	0	
	JUMLAH BELANJA KRO 1049.QBA	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	100.00	0	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1049	73.904.000	183.940.000	180.474.120	180.474.120	0	180.474.120	98.12	3.465.880	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.BF	73.904.000	183.940.000	180.474.120	180.474.120	0	180.474.120	98.12	3.465.880	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	73.904.000	183.940.000	180.474.120	180.474.120	0	180.474.120	98.12	3.465.880	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	73.904.000	183.940.000	180.474.120	180.474.120	0	180.474.120	98.12	3.465.880	
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	73.904.000	183.940.000	180.474.120	180.474.120	0	180.474.120	98.12	3.465.880	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	73.904.000	183.940.000	180.474.120	180.474.120	0	180.474.120	98.12	3.465.880	
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	73.904.000	183.940.000	180.474.120	180.474.120	0	180.474.120	98.12	3.465.880	
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	73.904.000	183.940.000	180.474.120	180.474.120	0	180.474.120	98.12	3.465.880	
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	73.904.000	183.940.000	180.474.120	180.474.120	0	180.474.120	98.12	3.465.880	